

ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENT OF NON-TAX STATE REVENUES (PNBP) AT THE MAIN PORT OFFICE OF BELAWAN

Faisal Akbar, Laylan Syafina

Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Wiliam Iskandar Ps.V Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Email: swatakbar1@gmail.com, laylansyafina@uinsu.ac.id

ABSTRACT

In the United States, Non-Tax State Revenue (PNBP) is non-tax revenue; on the contrary, it is the income earned from the society in return for the services rendered by an institution to the public. Currently, the government is trying to optimize PNBP in order to carry out government duties and contribute to national development. This study aims to determine whether the target of Non-Tax State Revenue (PNBP) set at the Belawan Syahbandar Main office has been achieved intensively in the last four (four) years, starting in the 2018-2021 fiscal year, and determine the impact of meeting the target on the regional economy (State Revenue). At the Belawan Syahbandar Utama office, you can pay cash (without tax). This research was conducted with a qualitative descriptive approach. The results of this study can be concluded that the Non-Tax State Revenue (PNBP) at the Belawan main port office for the last 4 (four) years starting from the 2018-2021 fiscal year has not experienced a significant increase. This is because the revenues from the types of services offered have not been achieved/realized properly, even tend to be weak from the targets that have been set so that they have not reached the PNBP target.

Keywords: PNBP Achievement, Belawan Main Port Office

ANALISIS PENCAPAIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN

ABSTRAK

Dimungkinkan untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa bergantung pada perpajakan; sebagai gantinya, pendapatan ini dihasilkan oleh komunitas sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh agen kepada komunitas. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan PNBP agar dapat melaksanakan semua tugas pemerintahan dan berkontribusi pada pertumbuhan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat intensif pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan dalam 4 (empat) tahun terakhir, Tahun yang dimulai dengan tahun anggaran 2018-2021, serta untuk mengetahui pengaruh pencapaian target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di kantor Syahbandar Utama Belawan dalam empat (empat) tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor Syahbandar Utama Belawan selama 4 (empat) tahun terakhir terhitung mulai tahun anggaran 2018-2021 belum mengalami peningkatan yang signifikan, penerimaan dari jenis jasa yang ditawarkan belum tercapai/realisasi dengan baik, bahkan cenderung lemah dari target yang telah ditetapkan sehingga belum mencapai target PNBP.

Kata kunci: Pencapaian PNBP, Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

PENDAHULUAN

Pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar, terutama yang berasal dari sumber daya negara, yang dapat berupa penerimaan negara bukan pajak, agar dapat berhasil melaksanakan keseluruhan rencana pembangunan negara dan pembangunan nasional (PNBP). Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah uang yang diterima negara yang tidak diperoleh melalui pajak. PNBP termasuk sebagai komponen penerimaan negara atau sebagai komponen penerimaan atau penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus diatur dan dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling fluktuatif. Meskipun kuantitas penerimaan negara bukan pajak tidak sebesar jumlah uang dari sektor pajak, namun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan belanja negara (Muhammad Tahrulloh, 2021). Penting untuk dicatat bahwa pelabuhan utama Belawan (KSU) berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini menjadi lebih signifikan dalam operasi ekonomi di mana transportasi laut merupakan pendorong kegiatan ekspor dan impor untuk memiliki pelabuhan utama Belawan sebagai pintu masuk

Pelabuhan Induk (KSU) Belawan yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membawahi berbagai jenis PNBP yang tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tarif PNBP yang Berlaku di Pelabuhan Utama Belawan (Indonesia No. 15 Tahun 2016). Meskipun seluruh penerimaan dari jasa yang diberikan oleh Syahbandar Utama (KSU) Belawan seperti jasa pelayaran dan navigasi pelayaran, dan jasa kelautan, disetorkan langsung ke bendahara pusat sebagai PNBP, namun pemerintah pusat menargetkan seluruh penerimaan dari Pelabuhan Induk Belawan Kepala Pelabuhan (KSU) setiap tahun. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memaksimalkan pendapatan setiap tahun (Presiden Republik Indonesia, 2018). Penulis mendapatkan besaran tujuan dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan navigasi pelayaran dan pelayanan perkapalan dan kelautan dalam 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dari Kesyahbandaran Utama Belawan (KSU) (PNBP). Besarnya target dan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan melalui pelayanan.

Tabel 1. Target dan Realisasi PNBP dari Pelayanan Navigasi Pelayaran dan Pelayaran dan Pelayaran Maritim pada Syahbandar Utama (KSU) Belawan Tahun Anggaran 2018-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	15.132.182.603	15.659.052.058
2	2019	16.230.886.083	13.251.794.647
3	2020	11.615.893.000	13.152.428.781
4	2021	16.284.642.175	13.457.049.811

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Induk (KSU) Belawan cenderung turun dari 2018 hingga 2021, dan tujuan yang ditetapkan tidak selalu tercapai. Berdasarkan tabel data di atas, target penerimaan PNBP tidak terlampaui pada tahun 2019 atau 2021. Target penerimaan tahun 2019 adalah Rp. 16.230.886.083, namun realisasinya hanya Rp. 13.251.794.647. Begitu pula dengan target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 16.284.642.175 sedangkan pendapatan sebenarnya hanya Rp. 13.457.049.811. Selain itu, realisasi pendapatan antara 2018 dan 2020 melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis tertarik untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Syahbandar Utama (KSU) Belawan, seperti yang tertera pada judul, sejalan dengan uraian di atas **“Analisis Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Syahbandar Utama Belawan.”**

Menindaklanjuti penjelasan konteks historis masalah yang telah diberikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1). Apakah target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan bisa tercapai? (2). Apa yang mempengaruhi pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan?.

Setelah membingkai masalah, tujuan studi berikut telah ditetapkan: (1). Untuk mengetahui tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelabuhan Utama Belawan dapat tercapai. (2). Menilai dampak pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor pelabuhan induk Belawan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua pendapatan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Semua pendapatan yang dipungut negara dari jasa atau manfaat sumber daya untuk hak yang dikuasai oleh pemerintah, serta pendapatan dari badan usaha milik negara bukan pajak lainnya diklasifikasikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (Sandra Gani Al Amin, 2015).

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah uang yang diterima negara yang bukan berasal dari pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah komponen APBN yang meliputi penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerimaan atau sumber penerimaan negara. Selain penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber uang negara yang harus dikuasai dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.

Dalam hal ini PNBP dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, terutama untuk PNBP lainnya, berbeda dengan PNBP yang dikelola oleh satu kementerian, seperti Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk penerimaan pajak, penjualan real estat, properti, layanan, pendidikan, dll. Leasing Saat ini, PNBP dikelola oleh lebih dari 3.000 orang. Total ada lebih dari 15.000 jenis dalam klasifikasi PNBP (satuan kerja) dari berbagai jenis dan unit kerja, yang masing-masing diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena perbedaan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masing-masing kementerian dan lembaga non-departemen memerlukan regulasi publik yang bersifat pribadi untuk kepentingan badan dan mempromosikan pembangunan nasional dan optimalisasi media bebas pajak. negara. Pendapatan Asli Daerah (PNBP).

Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP memiliki beberapa fungsi antara lain: **(1).** Peran budgeter adalah mengelola uang negara yang dihasilkan dari pemberian pelayanan atau penjualan barang-barang negara kepada masyarakat umum oleh kementerian atau lembaga negara. Dimungkinkan untuk menghasilkan uang dengan pajak atau kontribusi, serta melalui cara lain. **(2).** Peran regulasi, Penerimaan sebagai cara mengatur segala kebijakan pemerintah dari berbagai sudut pandang agar roda pembangunan tetap berputar disebut sebagai fungsi pengaturan. PNBP berasal dari setidaknya empat kelompok aliran pendapatan yang berbeda: PNBP sumber daya alam (SDA), aset pemerintah yang terpisah, layanan pemerintah langsung dari pengguna layanan tersebut, dan pengelolaan properti pemerintah. Berasal dari sumber daya alam, PNBP adalah ketika negara mengelola sumber daya alam dan karenanya mengeksplorasi dan mengeksploitasi segalanya dan kemudian negara berhak melindunginya. BUMN atau swasta harus memiliki prinsip memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat dan tentu saja dalam hal keberlanjutan dan keberlanjutan. Adapun PNBP tentang pengelolaan sumber daya pemerintah, landasan filosofisnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya pemerintah agar dapat digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Kami menggunakannya dengan filosofi terbaik dan tertinggi. Untuk PNBP yang berasal dari badan pemerintah tersendiri yang berbentuk badan usaha milik pemerintah, penghasilan pemerintah berupa pajak dibebaskan dalam bentuk dividen. Sebagai pemegang saham BUMN, kita berhak atas bagian keuntungan dalam rangka bagi hasil dan tentunya bagi hasil dan keputusan, jika bagi hasil tersebut dikembalikan dalam bentuk laba ditahan untuk memperkuat masing-masing BUMN. Klasifikasi PNBP yang keempat adalah pelayanan gratis, atau dalam hal ini beban masyarakat yang memperoleh manfaat dari pelayanan pemerintah, walaupun tidak untuk mencari keuntungan, tetapi merupakan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator makroekonomi. harga luar negeri yang lebih tinggi dan harga minyak yang lebih tinggi di pasar dunia. Hal ini penting karena pembangunan PNBP akan terus didukung oleh minyak dan sumber daya alam (SDA) yang sangat menguntungkan, yang sangat didorong oleh volatilitas harga. Harga minyak dan gas rupiah naik. Indonesia memiliki 68 kementerian dan departemen yang mengelola program PNBP, bersama dengan 68 kementerian dan lembaga lainnya. Ada enam (enam) kementerian dan lembaga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap proyek PNBP lainnya. Keenam kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Karena harus terjun ke lapangan, maka penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi/gejala yang bersifat alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, digunakan teknik pengumpulan data gabungan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada pemulusan perhitungan (Sugiyono, 2016). Untuk pendekatan yang digunakan peneliti berupa pendekatan deskriptif. Dalam teknik deskriptif ini, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Sumber Data

Asal informasi yang dipakai dalam penelitian yang dimaksud adalah data primer/mentah dan data sekunder yang didapatkan dari Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Data primer/mentah ialah data yang didapatkan dari kantor yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Jenis data mentah ini merupakan pernyataan langsung oleh bendahara PNBP terkait seluruh pengoperasian penerimaan dari pelayanan jasa yang ditawarkan. Contoh file berupa dokumentasi yang sudah ditulis serta hasil percakapan lisan dan tulisan yang langsung didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan terkait gambaran umum dari kegiatan penerimaan. Untuk file sekunder ialah file yang isinya info-info dan diterima langsung dari kantor yang tidak diubah sama sekali. Contoh dari file ini yaitu peta konsep karyawan kantor, data rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP serta data laporan target dan realisasi PNBP pertahun.

Teknik Analisis Data

Deskripsi pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes deskriptif. Tes deskriptif ini merupakan strategi untuk menguji data yang telah dikumpulkan dan dirangkai, serta dideskripsikan dan dianalisis, guna memberikan penjelasan menyeluruh bagi pemecah masalah terhadap tantangan yang dihadapi. Tujuan dari teknik tes deskriptif ini adalah untuk mengartikulasikan dan menjelaskan data saat ini untuk menyajikan gambaran situasi yang komprehensif. Ini dicapai melalui pengumpulan, kompilasi, dan analisis data yang terkait dengan operasi pendapatan yang dilakukan oleh organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendapatan, yang sering disebut keuntungan, adalah sejumlah uang yang dikumpulkan melalui penjualan produk atau penyediaan layanan selama periode waktu tertentu (Renata, 2021). Tata cara penerimaan di Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Belawan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Ditjen Perhubungan Laut Nomor: HK.103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan, dan Pelaporan Non- Pajak Penerimaan Negara yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel 2. Jenis Penerimaan di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

No	Nama Penerimaan	Singkatan
1	Layanan Navigasi Pelayaran	RAMBU/SBNP
2	Layanan Perkapalan Dan Kepelautan	PUPK

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Tabel 3. Target Pelayanan Navigasi Pelayaran (RAMBU/SBNP) dan Pelayanan Perkapalan Dan Kepelautan (PUPK) Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Target	
	RAMBU/SBNP	PUPK
2018	10.147.570.103	4.498.612.500
2019	13.403.468.908	2.827.417.175
2020	9.412.213.000	2.203.680.000
2021	13.365.500.000	2.919.142.175

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Rekapitulasi PNBP Penerimaan dan Penyetoran PNBP dari setiap tahun tergantung jenis penerimaan di Kantor Kesyahbandaran Induk Belawan dijelaskan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis.

Tabel 4. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBK Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2018

No	Bulan	Penerimaan dan Penyetoran (Rp)		Jumlah
		RAMBU	PUPK	
	Saldo	8.700		8.700
1	Januari	1.047.483.689	181.936.715	1.229.420.404
2	Februari	960.173.029	203.573.695	1.163.746.724
3	Maret	999.755.455	168.273.475	1.168.028.930
4	April	1.169.125.874	182.545.558	1.351.671.432
5	Mei	1.248.269.547	276.805.420	1.525.074.967
6	Juni	911.792.070	228.001.775	1.139.793.845
7	Juli	1.164.986.192	293.334.399	1.458.320.591
8	Agustus	1.117.926.922	209.521.885	1.327.448.807
9	September	1.002.684.896	203.122.510	1.205.807.406
10	Oktober	1.275.711.244	256.972.245	1.532.683.489
11	November	1.131.745.246	187.902.725	1.319.647.971
12	Desember	1.057.046.595	180.352.197	1.237.398.792
	Jumlah	13.086.709.459	2.572.342.599	15.659.052.058

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Tabel 5. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBK Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Penerimaan dan Penyetoran (Rp)		Jumlah
		RAMBU	PUPK	
1	Januari	965.607.305	194.039.277	1.159.646.582
2	Februari	725.021.673	169.396.805	894.418.478
3	Maret	896.790.792	226.552.495	1.123.343.287
4	April	878.199.592	182.449.990	1.060.649.582
5	Mei	1.031.981.405	280.196.900	1.312.178.305
6	Juni	607.126.567	99.307.375	706.433.942
7	Juli	1.011.276.311	207.474.120	1.218.750.431

8	Agustus	943.267.128	246.973.755	1.190.240.883
9	September	841.457.649	205.969.220	1.047.426.869
10	Oktober	879.569.002	352.289.590	1.231.858.592
11	November	931.839.682	245.009.260	1.176.848.942
12	Desember	930.560.714	199.438.040	1.129.998.754
Jumlah		10.642.697.820	2.609.096.827	13.251.794.647

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan dan Penysetoran PNBP Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2020

No	Bulan	Penerimaan (Rp)		Jumlah
		RAMBU	PUPK	
1	Januari	819.487.961	222.790.065	1.042.278.026
2	Februari	841.271.111	214.648.990	1.055.920.101
3	Maret	836.107.774	268.007.980	1.104.115.754
4	April	952.032.373	155.926.130	1.107.958.503
5	Mei	746.382.573	147.044.315	893.426.888
6	Juni	859.252.205	177.364.225	1.036.616.430
7	Juli	931.096.086	225.774.305	1.156.870.391
8	Agustus	900.404.448	279.387.345	1.179.791.793
9	September	1.001.435.647	272.657.585	1.274.093.232
10	Oktober	932.710.646	171.881.975	1.104.592.621
11	November	904.412.210	155.073.190	1.059.485.400
12	Desember	921.068.807	216.210.795	1.137.279.602
Jumlah		10.645.661.881	2.506.766.900	13.152.428.781

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Tabel 7. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2021

No	Bulan	Penerimaan dan Penyetoran (Rp)		Jumlah
		RAMBU	PUPK	
1	Januari	881.331.295	129.950.705	1.011.282.000
2	Februari	995.886.856	166.884.965	1.162.771.821
3	Maret	1.062.020.997	243.414.580	1.305.435.577
4	April	909.104.552	171.310.755	1.080.415.307
5	Mei	925.780.130	163.592.205	1.089.372.335
6	Juni	853.269.216	217.048.625	1.070.317.841
7	Juli	1.054.289.638	161.293.620	1.215.583.258
8	Agustus	955.903.668	197.040.195	1.152.943.863
9	September	933.171.915	153.841.750	1.087.013.665
10	Oktober	850.364.278	163.318.080	1.013.682.358
11	November	956.064.611	175.149.845	1.131.214.456
12	Desember	940.690.850	196.326.480	1.137.017.330
Jumlah		11.317.878.006	2.139.171.805	13.457.049.811

Sumber: Faisal Akbar, 2022

Pembahasan

Berdasarkan analisis data, penulis menghitung selisih/perbandingan antara tujuan penerimaan RAMBU dan PUPK dengan realisasi penerimaan RAMBU dan PUPK Tahun Anggaran 2018-2021 yang terjadi di kantor Kesyahbandaran Induk Belawan.

Tabel 8. Selisih Target Penerimaan RAMBU dengan Realisasi RAMBU Tahun Anggaran 2018-2021 Pada kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

Tahun	Target	Realisasi		Keterangan
	RAMBU (Rp)	RAMBU (Rp)	Selisih (Rp)	
2018	10.147.570.103	13.086.709.459	2.939.139.356	Pada tahun 2018, target yang ditetapkan dapat tercapai, dan dalam beberapa kasus cenderung melampaui target, namun hal ini tidak serta merta berarti tahun tersebut berhasil karena realisasi yang diperoleh mungkin masih lemah atau kurang

				tinggi dari target.
2019	13.403.468.908	10.642.697.820	2.760.771.088	Karena terdapat ketidaksesuaian antara tujuan dan kenyataan di tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa target PNBPN pendapatan dari jasa navigasi laut tahun ini tidak terpenuhi.
2020	9.412.213.000	10.645.661.881	1.233.448.881	Pada tahun 2020, tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan sukses, bahkan dapat mengungguli atau bahkan melampaui tujuan yang telah ditetapkan. Namun dapat dikatakan bahwa tingkat realisasi yang diperoleh masih kurang atau kurang optimal
2021	13.365.500.000	11.317.878.006	2.047.621.994	Di tahun 2021, terdapat selisih antara target dengan realisasi yang membuat penerimaan jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBPN, maka bisa disadari masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 9. Selisih Target Penerimaan PUPK dengan Realisasi PUPK Tahun Anggaran 2018-2021 Pada kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

Tahun	Target	Realisasi		Keterangan
	PUPK (Rp)	PUPK (Rp)	Selisih (Rp)	
2018	4.498.612.500	2.572.342.599	2.412.269.901	Ketika terjadi disparitas antara tujuan dengan apa yang sebenarnya terjadi, pendapatan pelayaran dan jasa kelautan tidak mencapai target PNBPN tahun 2018, meskipun tidak meleset dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2019	2.827.417.175	2.609.096.827	218.320.348	Dapat dikatakan bahwa penerimaan dari pelayaran dan jasa kelautan tidak melebihi target PNBPN tahun 2019, karena adanya

				ketidaksesuaian antara target dan realisasi tahun 2019.
2020	2.203.680.000	2.506.766.900	303.086.900	Pada tahun 2020, tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, dan mereka bahkan dapat mengungguli atau bahkan melampaui tujuan yang telah ditetapkan. Namun dapat dikatakan bahwa tingkat realisasi yang dicapai masih kurang atau kurang tinggi.
2021	2.919.142.175	2.139.171.805	779.970.370	Pada tahun 2021 terjadi disparitas antara tujuan dengan hasil yang sebenarnya, sehingga pendapatan pelayaran dan jasa kelautan kurang dari target PNBPN, atau bahkan masih jauh dari target yang telah ditetapkan untuk kantor itu sendiri.

Dari berbagai penampakan yang sudah terlihat diatas yang telah pecahkan oleh peneliti terlihat bahwa penerimaan Jasa Navigasi Pelayaran (RAMBU/SBNP) dan Jasa Perkapalan Dan Kepelautan (PUPK) Tahun Anggaran 2018-2021 masih belum terealisasi dengan baik sehingga target yang ditetapkan masih belum mencapai target PNBPN. Untuk meningkatkan penerimaan PNBPN kantor Kesyahbandaran harus lebih meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kerja sama dengan prima agar penerimaan PNBPN dapat tercapai dan lebih optimal.

Karena pemerintah kini sedang merencanakan pertumbuhan di berbagai sektor, PNBPN memainkan fungsi yang sangat vital bagi negara. Karena kebutuhan dan harapan masyarakat terus berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan, menawarkan layanan berkualitas tinggi tidak diragukan lagi merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memberikan layanan pajak. Dalam hal memberikan pelayanan prima dan mengatasi berbagai tantangan yang sering terjadi selama pelayanan, menerapkan praktik tata kelola yang baik di kantor pusat Kesyahbandaran Belawan adalah salah satu metode yang paling efektif untuk melakukannya. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh staf, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang sederhana dan mampu menyelesaikan segala kesulitan atau keluhan yang mungkin dialami.

PENUTUP

Setelah peneliti mendapatkan keputusan dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor Syahbandar Induk Belawan tidak meningkat banyak selama 4 (empat) tahun terakhir, dimulai dari tahun anggaran 2018-2021.

Pada tahun 2018 target RAMBU yang ditetapkan dapat tercapai bahkan cenderung melebihi dari target namun belum tentu dikatakan baik karena bisa jadi realisasi yang dicapai masih lemah/kurang tinggi. Serta terdapat selisih antara target dengan realisasi PUPK yang membuat penerimaan pada jasa perkapalan dan kepulauan tidak mencapai target PNBPN, bahkan masih belum bisa meningkat dengan sempurna.

Di tahun 2019, terdapat selisih antara target dengan realisasi RAMBU sehingga bisa dikatakan penerimaan pada jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBPN. Dan juga terdapat selisih antara target dengan realisasi PUPK sehingga bisa dikatakan penerimaan pada jasa perkapalan dan kepulauan tidak mencapai target PNBPN.

Pada tahun 2020 target RAMBU yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik bahkan cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun, realisasi yang dicapai bisa dikatakan masih lemah/kurang tinggi. Untuk PUPK target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik bahkan cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun, realisasi yang dicapai bisa dikatakan masih lemah/belum cukup tinggi.

Di tahun 2021, terdapat selisih antara target dengan realisasi RAMBU yang membuat penerimaan jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBPN, bahkan untuk melebihi dari target masih terlalu jauh dari target yang sudah ditetapkan. Sama halnya PUPK terdapat selisih antara target dengan realisasi yang membuat

penerimaan pada jasa perkapalan dan kepelautan tidak mencapai target PNBP, bahkan tidak cukup meroket dari yang sudah diharapkan.

Hal ini disebabkan masih belum tercapainya/terwujudnya akseptabilitas yang tepat dari jenis pelayanan yang diberikan, bahkan cenderung tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Selisih antara target penerimaan RAMBU dan PUPK dengan realisasi penerimaan tahun anggaran 2018-2021 belum menyempit, dan target PNBP belum terpenuhi setiap tahun. Pelayanan publik yang berkualitas akan menjadi aspek yang semakin vital dalam menyelenggarakan pelayanan perpajakan, seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin cepat. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan adalah cara terbaik untuk menghasilkan layanan yang berkualitas dan menyelesaikan berbagai masalah yang sering muncul dalam layanan. Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari berbagai layanan dan akan mampu mengatasi semua kesulitan dan keluhan yang ada jika staf mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dari kesimpulan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan sedikit saran yang mungkin dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Kantor diharapkan harus lebih meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kerja sama dengan prima agar penerimaan PNBP dapat tercapai dan lebih optimal guna untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, S. G. Al. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pada Upt Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi*. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Perhubungan*. PP RI No 15 Tahun 2016. Jakarta.
- Renata, T. (2021). *Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak. 1(1), 1–5.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Muhammad Tahrulloh, dkk (2021). *Analisis Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun Anggaran 2016-2020*. Gorontalo Fisheries journal. 4(1), 14–26.